



**LURAH PALBAPANG  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PALBAPANG  
2022**



LURAH PALBAPANG  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PALBAPANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Palbapang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);



2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 41, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6321);
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 No.1295);
8. Peraturan Menteri Desa PDTT No.17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
9. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 No. 960);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
19. Peraturan Desa Palbapang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Palbapang Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Palbapang (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2020 Nomor 9);
21. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Palbapang (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2020 Nomor 10);



22. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Staf Honoror Kalurahan Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PALBAPANG**  
 dan  
**LURAH PALBAPANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 4.849.392.094,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 5.301.183.520,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 451.791.426,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 511.791.426,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 60.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 451.791.426,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal,
- b. Daftar Penyertaan Modal;

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kal.

### Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Palbapang.

Ditetapkan di : Palbapang  
Pada tanggal : 30 Desember 2022  
PALBAPANG,



Diundangkan di : Palbapang  
Pada tanggal : 30 Desember 2022  
CARIK PALBAPANG,

EFI ARIYANTA WIBAWA

LEMBARAN KALURAHAN PALBAPANG TAHUN 2022 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG KAPANEWON BANTUL  
(40/Kalurahan Palbapang/2022)

## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Desember tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY SUWARNO, S.S

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Palbapang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : SUKIRMAN, S.H.

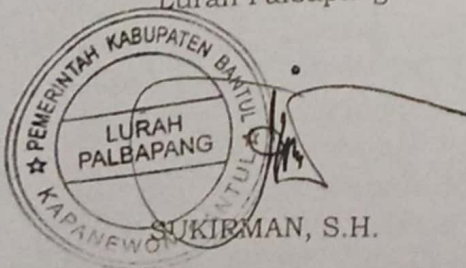
Jabatan : Lurah Palbapang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Palbapang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

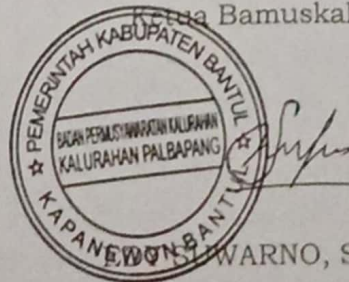
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Lurah Palbapang



SUKIRMAN, S.H.

PIHAK KESATU  
Ketua Bamuskal



EDY SUWARNO, S.S





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON BANTUL**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**KALURAHAN PALBAPANG**

Alamat: Jalan.P.Senopati No 06 Palbapang Bantul 55713 Telp (0274) 368313

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN PALBAPANG KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 08/KPTS/Bamuskal/2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
  2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 41, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6321);



3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 No.1295);
8. Peraturan Menteri Desa PDTT No.17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
9. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 No. 960);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
19. Peraturan Desa Palbapang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Palbapang Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Palbapang (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2020 Nomor 9);
21. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Palbapang (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 07 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Staf Honorer Kalurahan Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

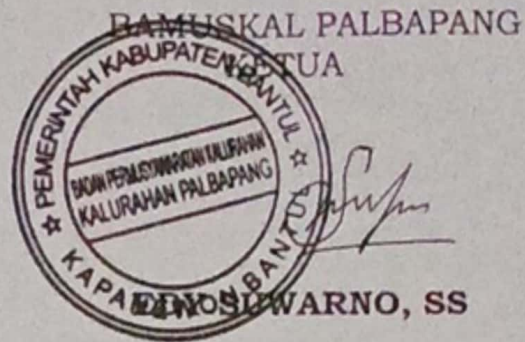
Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PALBAPANG KAPANEWON BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023



Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan.

Kedua : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palbapang  
Pada tanggal : 26 Desember 2022



Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag Pemdes Setda. Kab. Bantul;
3. Kabag Hukum Setda. Kab. Bantul;
4. Panewu Bantul.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PALBAPANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	265.535.669,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.573.856.425,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.849.392.094,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.383.288.300,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.327.532.350,00	
5.3.	Belanja Modal	1.390.362.870,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.301.183.520,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(451.791.426,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	511.791.426,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	511.791.426,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>451.791.426,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PALBAPANG, 30 Desember 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PALBAPANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	265.535.669,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.573.856.425,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.849.392.094,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.258.298.321,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.739.567.225,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.132.800,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.132.800,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	725.387.832,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	725.387.832,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.724.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.724.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	264.878.925,00	PAD, PBH, PBK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.878.925,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	132.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	132.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	28.050.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.350.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.350.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	14.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	7.140.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	7.140.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	55.125.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	55.125.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	53.847.280,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	53.847.280,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	200.304.000,00	ADD, PBH
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	200.304.000,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	121.327.388,00	ADD, PBH
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	121.327.388,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>25.100.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.100.000,00	ADD, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.100.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>30.995.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.500.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.300.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.250.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.890.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.890.000,00	
1.3.90		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	5.055.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.055.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>381.948.304,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	123.800.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	19.705.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.705.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	40.450.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.450.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	25.200.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.900.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	41.700.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	37.675.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.175.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	23.000.000,00	ADD



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	64.518.304,00	ADD, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.518.304,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>80.687.792,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10.204.452,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.204.452,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	56.540.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.540.000,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	8.368.340,00	DLL
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.493.669,00	
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	5.874.671,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	5.575.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.740.087.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>438.650.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	86.900.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.900.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	33.700.000,00	BMP
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.700.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	113.500.000,00	BMP
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.500.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	193.075.000,00	SDD
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	193.075.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.475.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.475.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>337.628.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	43.640.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.640.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	88.839.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.839.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.700.000,00	BMP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	105.500.000,00	BMP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	5.610.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.610.000,00	
2.2.93		Pengelolaan Kalurahan Inklusif	16.400.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	14.985.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.985.000,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	2.955.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.955.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	40.069.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.069.000,00	
2.2.98		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	5.930.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.930.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>595.000.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	50.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	20.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	525.000.000,00	PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	525.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>219.155.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	22.555.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.555.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	161.600.000,00	BMP
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.600.000,00	
2.4.93		Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut	35.000.000,00	PBK
2.4.93	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>59.043.000,00</b>	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	40.515.000,00	BMP, DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.515.000,00	
2.5.92		Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	18.528.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.528.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>85.861.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.861.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.861.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	80.000.000,00	PBK
2.6.06	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>4.750.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.750.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>442.615.199,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	200.630.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	15.900.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	38.375.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.375.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	39.930.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.930.000,00	
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	15.900.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kelurahan	90.525.000,00	DDS
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.525.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	64.415.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.240.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	56.175.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.175.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	95.430.199,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	17.800.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	48.930.199,00	SDD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	48.930.199,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	28.700.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	82.140.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	33.715.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.715.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.425.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.425.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>660.183.000,00</b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	8.115.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	8.115.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.115.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	375.293.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	93.075.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.075.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	24.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	195.983.000,00	DDS, PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	195.983.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) d an Peternakan	20.835.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.835.000,00	
4.2.95		Angkat Walet	41.400.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.770.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.950.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.820.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	70.055.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	42.000.000,00	BMP
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.475.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	
4.4.90		Pendataan Penyandang Disabilitas	14.180.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.180.000,00	
4.4.91		Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Kel uarga	8.400.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.450.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	7.450.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	3.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	189.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	189.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	189.000.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>200.000.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	180.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.301.183.520,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(451.791.426,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	511.791.426,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>451.791.426,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PALBAPANG, 30 Desember 2022

